

# **IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS-KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT(PUSKESMAS) STUDI PADA PUSKESMAS PEKKAE KEC.TANETE RILAU KAB.BARRU**

**Musdalifa**

STIA Al Gazali Barru  
musdalifa@algazali.ac.id

## **ABSTRAK**

*Jaminan kesehatan di Indonesia bukanlah barang baru, dari tahun 1985 Indonesia sudah mengenal asuransi kesehatan untuk tenaga kerja, lalu berkembang menjadi PT ASKES (Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Untuk menuju penjaminan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh, awal tahun 2014 pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional meluncurkan program yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program BPJS- Kesehatan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala, terutama karena terbatas nya fasilitas IT yang ada pada Puskesmas Pekkae sehingga berpengaruh terhadap Klaim berkas Program BPJS-Kesehatan. Masalah yang diteliti adalah gambaran implementasi kebijakan Program BPJS-Kesehatan pada Puskesmas Pekkae, kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Kesehatan, BPJS, Puskesmas*

## A. PENDAHULUAN

Jaminan kesehatan di Indonesia bukanlah barang baru, dari tahun 1985 Indonesia sudah mengenal asuransi kesehatan untuk tenaga kerja, lalu berkembang menjadi PT ASKES (Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Untuk menuju penjaminan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh, awal tahun 2014 pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional meluncurkan program yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program BPJS-Kesehatan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala, terutama karena terbatasnya fasilitas IT yang ada pada Puskesmas Pekkae sehingga berpengaruh terhadap Klaim berkas Program BPJS-Kesehatan. Masalah yang diteliti adalah gambaran implementasi kebijakan Program BPJS-Kesehatan pada Puskesmas Pekkae, kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Namun sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan kalangan masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah yang tentu saja rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Hal tersebut

berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri seperti rendahnya kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya upaya pencegahan penyakit dan perilaku hidup sehat dikalangan masyarakat, rendahnya pengetahuan tentang berbagai gejala dan jenis penyakit, rendahnya kualitas lingkungan dan ketidakmerataan penyebaran tenaga kesehatan.

Maka dari itu dibentuklah suatu program pelayanan kesehatan oleh pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakatnya. Dalam hal ini Pelayanan tersebut diselenggarakan melalui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-Kesehatan.

Program BPJS-Kesehatan merupakan upaya Pemerintah Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin kesehatan masyarakat secara Nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada Pasal 28 (ayat 3) dan Pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa "Jaminan Sosial adalah hak setiap warga negara" dan "Negara mengembangkan Sistem Jaminan

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Menurut Nawawi (2005: 64) bahwa bentuk deskriptif yaitu bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek enelitian. informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan

pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya yang membahas tentang “:Implementasi Program BPJS-Kesehatan Dalam Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) Studi Pada Puskesmas Pekkae Kec.Tanete Rilau Kab.Barru.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tugas dan Fungsi Puskesmas Pekkae

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara mrnyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok.Jenis pelayan kesehatan disesuaikan dengan kemampuan puskesmas, namun terdapat upaya kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh puskesmas ditambah dengan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada serta kemampuan puskesmas. Upaya-upaya kesehatan wajib tersebut adalah :

- a. Upaya promosi kesehatan
- b. Upaya kesehatan lingkungan
- c. Upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana

- d. Upaya perbaikan gizi masyarakat
- e. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- f. Upaya pengobatan

Secara umum tugas pokok dan fungsi Puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang ada diwilayah kerjanya. Dalam hal ini puskesmas Pekkae melaksanakan tugas dan fungsinya di

7 wilayah kerja yakni di desa Pao-Pao, desa Tellumpanua, Kel.Lalolang, Kel.Tanete, Desa Garessi, desa Lipukasi.

### **Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Pukkae**

Program BPJS-Kesehatan merupakan program pemerintah dalam rangka menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dari petugas pelayanan kesehatan dengan sistem penjaminan kesehatan secara nasional. Berikut pemaparan mengenai penyelenggaraan kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. berdasarkan kerangka konsep yang peneliti adopsi dari Van Meter dan Van Horn.

#### **Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

#### **a. Peraturan Pelaksana Program BPJS-Kesehatan**

Peraturan tentang pelaksanaan suatu program haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipahami oleh pelaksana program tersebut. Menurut informasi yang diperoleh dari salah seorang informan yang merupakan kepala Puskesmas Pekkae kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, puskesmas ini memiliki Buku Kumpulan Peraturan Jaminan Kesehatan yang didalamnya terdapat 4 jenis regulasi, yaitu Undang-undang No.40

tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-undang

No.24 tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Presiden No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Secara langsung peneliti juga menanyakan mengenai peraturan-peraturan yang informan ketahui, dan informan tersebut dapat dengan baik menjelaskan kepada peneliti mengenai aturan aturan tata kelol BPJS- Kesehatan dengan baik. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait dengan peraturan dan tata aturan program BPJS kesehatan :

Pertanyaan :

Bagaimana menurut bapak/ibu

sudah sesuaikah peraturan yang dibuat pemerintah terkait dengan program BPJS kesehatan ini?

*“Ada buku panduan dan kebijakannya kita dapat dari pemerintah dan kami disini menjalankan program kepada masyarakat terutama program BPJS-Kesehatan ini yaa berdasarkan prosedur yang tertulis tersebut...” (Ns – 1)*

*“prosedur yang kita jalankan kita jalankan sesuai dengan prosedur yang ada di peraturan yang tertulislah & dinkes juga melakukan semacam bentuk seminar gitu kepada kami kami ini supaya lebih paham menjalankan layanan ini” (Ns -2)*

*“sudah taulah kan kita dapat sosialisasi tentang peraturan dan prosedur Bpjs, banyak peraturannya yang kadang buat berbelit kayak pemesanan obat dan sistem rujukan ke rumah sakit umum Sidikalang” (Ns – 3)*

*“kalau prosedur dan aturan kita sebenarnya memahami dengan baik, tai terkadang apa yang kita temukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat contohnya masyarakat pengennya kalau udah bayar BPJS- kesehatan pas mereka sakit mereka pengen nya cepat-cepat, padahal kan banyak tata prosedur yang mesti kita lakukan, gitu dek” (Ns-4)*

Kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh pernyataan diatas adalah menurut para informan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat membantu pihak puskesmas dalam

menjalankan program ini, ditambah lagi seluruh informan menyatakan peraturan yang dibuat pemerintah sudah mampu menjadi pegangan dalam menjalankan prosedur layanan kesehatan bagi masyarakat pengguna jaminan kesehatan BPJS-kesehatan

Pemerintah kabupaten Dairi melalui dinas kesehatan Pemkab juga turut serta dalam melancarkan program ini dengan melakukan sosialisasi tentang tata layanan dan prosedur BPJS-kesehatan terhadap pelayan kesehatan.

#### **b. Sasaran Program BPJS-Kesehatan**

Pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap tujuan/sasaran dari program BPJ-Kesehatan ini menjadi salah satu faktor penting penentu berjalannya program dengan baik dan tepat sasaran. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan pihak puskesmas terkait pemahaman informan mengenai kepesertaan program BPJS- Kesehatan di wilayah kerja puskesmas Pekkae.

PJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau

iurannya dibayar oleh pemerintah.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Program BPJS-Kesehatan merupakan program pemerintah dalam rangka menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima dari petugas pelayanan kesehatan dengan sistem penjaminan kesehatan secara nasional. Berikut pemaparan mengenai penyelenggaraan kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Pekkae Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. berdasarkan kerangka konsep yang peneliti adopsi dari Van Meter dan Van Horn.
- Jaminan kesehatan di Indonesia bukanlah barang baru, dari tahun 1985 Indonesia sudah mengenal asuransi kesehatan untuk tenaga kerja, lalu berkembang menjadi PT ASKES (Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Untuk menuju penjaminan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh, awal tahun

2014 pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional meluncurkan program yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program BPJS- Kesehatan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala, terutama karena terbatas nya fasilitas IT yang ada pada Puskesmas Pekkae sehingga berpengaruh terhadap Klaim berkas Program BPJS-Kesehatan.

- Jaminan kesehatan di Indonesia bukanlah barang baru, dari tahun 1985 Indonesia sudah mengenal asuransi kesehatan untuk tenaga kerja, lalu berkembang menjadi PT ASKES (Persero) dan PT Jamsostek (Persero). Untuk menuju penjaminan kesehatan yang lebih baik dan menyeluruh, awal tahun 2014 pemerintah Indonesia melalui Undang- Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional meluncurkan program yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program BPJS- Kesehatan. Namun pada pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala, terutama karena terbatas nya fasilitas IT yang ada pada Puskesmas Pekkae sehingga berpengaruh terhadap Klaim berkas

Program BPJS-Kesehatan. Masalah yang diteliti adalah gambaran implementasi kebijakan Program BPJS-Kesehatan pada Puskesmas Pekkae, kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, E. James, 1997, *Public Policy-Making*, Third Edition. New York, Holt, Rinchart and Winston.
- Arif, Saiful. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Malang : Averroes Press
- Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Bungin, Burhan. 2005. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana.
- Dunn, N., William, 1994, *Public Policy Analysis: An Introduction*. Edisi Ke-2, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Co., Terjemahan dari Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Isamy, M. Irfan, 1994, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy)*, Jakarta, Rajawali Press.
- Juliantara, Dadang. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan
- Santosa, H., DG. Hidyata dan P. Indrayono, 2003, *Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel Tahun II No.2 April 2002, Jakarta, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org)
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta : PT. Pustaka LP3LS Indonesia.
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Saryono, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Medika, 2010
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 2013

## Sumber Internet :

- <http://www.deokes.go.id/Indonesia-sehat.html>/diakses pada 22 September 2015 pukul 14.00 WIB
- <http://www.kompasiana.com/dian-mohammad-anwar/aspek-aspek-kesehatan.html>/diakses pada 22 September 2015 pukul 15.42 WIB